

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

## TAHUN 2020



**DINAS PERIKANAN**  
**KABUPATEN MALINAU**  
**PROVINSI KALTARA**

## TAHUN 2021

Alamat : Jln. Pusat Perkantoran Pemda Malinau Gedung  
Gabungan Dinas Lt. I

Emai : [disperikan.malinau@gmail.com](mailto:disperikan.malinau@gmail.com)



## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Perikanan Tahun 2020 ini dapat tersusun. Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dari Dinas Perikanan sebagai instansi Pemerintah untuk melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Malinau yang meliputi 2 ( Dua ) bidang yaitu Bidang Usaha Perikanan dan Perikanan Budidaya. Pelaksanaan kegiatan tersebut, berdasarkan visi dan misi organisasi yang telah dicanangkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyadari Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perikanan Malinau Tahun 2020 , masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian diharapkan agar dapat bermanfaat bagi kita dalam membangun sektor Perikanan di Kabupaten Malinau untuk mewujudkan perikanan yang modern, tangguh dan efisien menuju masyarakat petani yang sejahtera.

Kepada semua pihak yang telah memberikan informasi, saran dan pendapat untuk penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Malinau, 20 Januari 2020

Kepala Dinas  
  
**Sofyan, S.PD, M.Si**  
Nip. 19640109 199403 1 006



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau, Dinas Perikanan mempunyai Tugas Pokok yaitu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau tahun 2019 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hasil Penilaian atas pelaksanaan kinerja selama tahun 2020 menunjukkan bahwa capaian sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Malinau adalah 36,52 % yang dapat dilihat pada table RE. 1:

**Tabel RE. 1 :**  
**Capaian Sasaran Strategis**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN KINERJA (%)
1	Meningkatnya pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	208,51	95,62	45,86
		Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	167	41,52	24,86
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>					<b>36,52</b>



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Ikhtisar Eksekutif .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I. Pendahuluan .....</b>	<b>1</b>
A. Dasar Pembentukan Organisasi .....	1
B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas .....	1
C. Aspek Strategis Organisasi .....	2
D. Struktur Organisasi .....	3
E. Sumber Daya Manusia Aparatur .....	5
F. Permasalahan Utama .....	7
G. Sistematika Penyajian .....	9
<b>BAB II. Perencanaan Kinerja .....</b>	<b>11</b>
A. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 .....	11
1. Tujuan dan Sasaran .....	11
2. Indikator Kinerja .....	12
3. Strategi dan Arah Kebijakan .....	14
4. Program .....	15
B. Rencana Kinerja Tahunan .....	17
C. Perjanjian Kinerja .....	19
<b>BAB III. Akuntabilitas Kinerja .....</b>	<b>21</b>
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	22



B. Analisis Capaian Kinerja .....	24
C. Realisasi Anggaran .....	36
BAB IV. Penutup .....	47
A. Kesimpulan.....	47
B. Langkah Perbaikan.....	48

LAMPIRAN



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Dasar Pembentukan Organisasi**

Dasar pembentukan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah No .4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau dan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Malinau mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten di bidang Perikanan dan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Malinau di bidang perikanan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

#### **B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau**

Dalam menyelenggarakan tugas Dinas Perikanan Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 Pasal 306 Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang di berikan kepada Kabupaten. Secara teknis berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 Tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah propinsi dan kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan, mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;
2. Melaksanakan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP dibidang pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidaya ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah



kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) dan pengelolaan pembudidaya ikan;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidaya ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI) serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan ;
5. Pelaksanaan Fungsi lain yang terkait bidang perikanan yang di berikan oleh Bupati.

### C. Aspek Strategis Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 , Pasal 306 Dinas Perikanan mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan Pemerintahan daerah di Bidang Usaha Perikanan, Bidang Perikanan Budidaya yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten

Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Malinau periode 2016 – 2021 adalah ***Mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun.*** Visi yang ditetapkan tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kabupaten Malinau. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kabupaten Malinau dengan potensi besar dan tingkat keragaman yang tinggi, harus mampu dibangun menuju masyarakat yang maju dan sejahtera dalam kebersamaan berdasarkan falsafah Pelangi.

Guna mewujudkan visi tersebut diatas, ada 12 (Duabelas) misi yang harus dilaksanakan sebagai pengejawantahan dari falsafah pelangi, dimana Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan fungsi Pelaksana dari misi ke Lima (5) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni ***Meningkatkan Peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa : One Village One Product dengan semboyan " Bertani Sehat"***



Untuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, telah disusun program prioritas pembangunan periode 5 (lima) tahun kedepan (2016 – 2021) yang terdiri dari 13 (tiga belas) program utama dan 3 (tiga) program unggulan, diantaranya merupakan program unggulan yaitu :

1. Program RT Bersih
2. Program Wajib Belajar Enam belas tahun ( Wajar 16 Tahun )
3. Program Beras Daerah

Program-program yang hendak dicapai diuraikan dalam wujud kegiatan/ sub kegiatan sebagai penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Dinas Perikanan dengan asumsi menopang **"Pertumbuhan Ekonomi Meningkat (Goal)"** pada tahun 2016 - 2021 dari sektor perikanan didukung pagu dana indikatif sesuai kebutuhan.

#### **D. Struktur Organisasi**

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016, sebagai berikut :

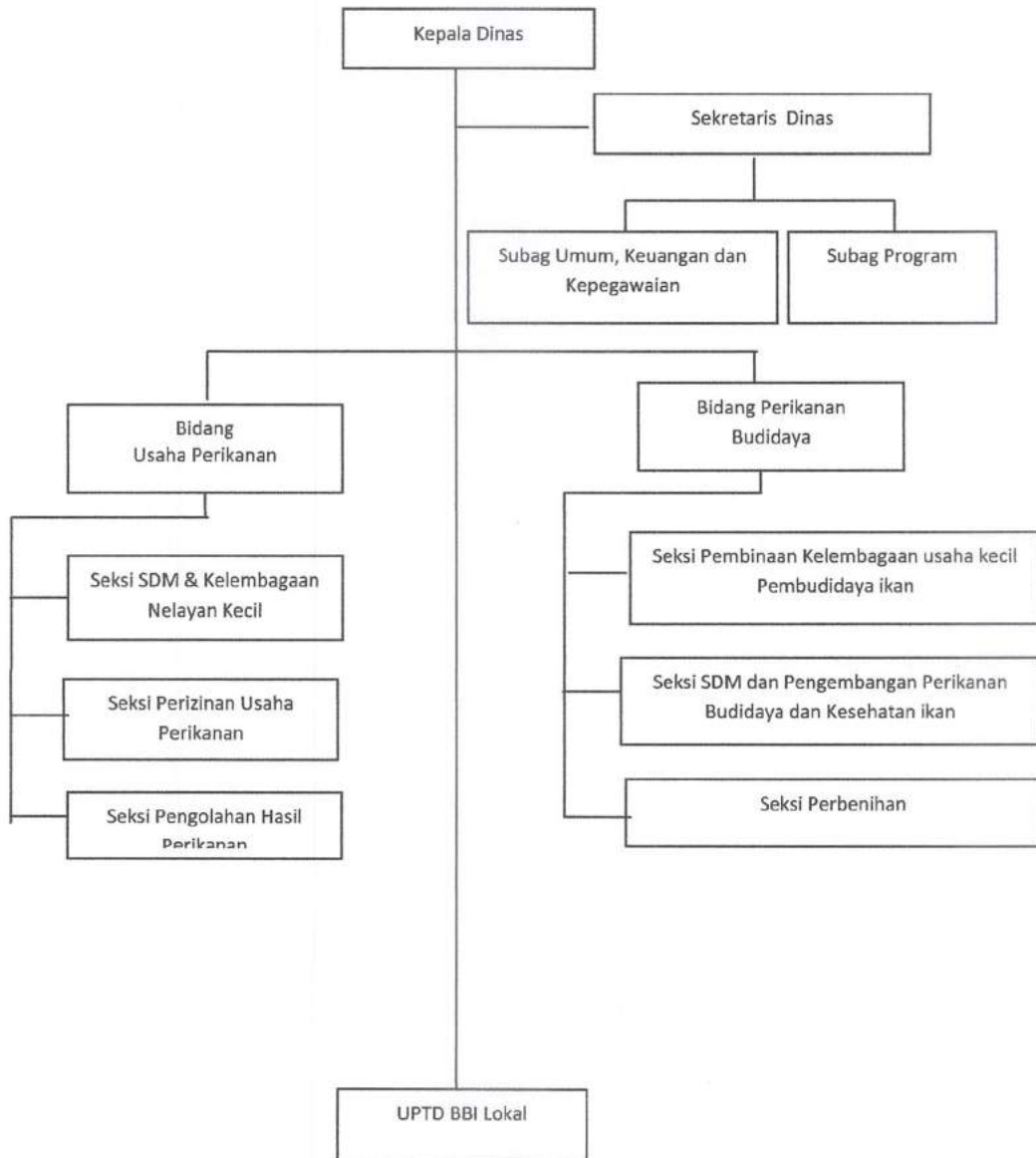
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Penyusunan Program
3. Bidang Usaha Perikanan terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil
  - b. Seksi Perizinan Usaha Perikanan
  - c. Seksi Pengolahan Hasil Perikanan
4. Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
  - a. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
  - b. Seksi SDM dan Pengembangan Perikanan Budidaya dan Kesehatan Ikan
  - c. Seksi Pembenihan dan Produksi Perikanan Budidaya



5. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
6. Kelompok Jabatan Fungsional

Selanjutnya Bagan dan Susunan Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau.

Gambar 1.1





## E. Sumber Daya Manusia Aparatur

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau per 31 Desember 2018 memiliki sumber daya manusia aparatur sebagai berikut :

**Tabel.1.2**

**Jumlah PNS dan PPT Dinas Perikanan  
Kab.Malinau Berdasarkan Tingkat Pendidikan  
Tahun 2020**

No	Pendidikan	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS	PTT	
1.	SD	-	-	-
2.	SMP	1	-	1
3.	SMA	7	-	7
4.	Diploma	4	-	4
5.	Sarjana	13	-	13
6.	Pasca Sarjana/S2	3	-	3
Jumlah				28

*Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2020*

Berdasarkan dari tabel 1.2, terlihat bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dinas Perikanan sebagai besar berpendidikan Strata Satu (Sarjana / S1) sebanyak 13 orang, SMA sederajat sebanyak 7 orang, Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 Orang, Diploma 4 dan SMP 1 orang. Berdasar jenjang pendidikan tersebut menunjukkan bahwa SDM Aparatur Dinas Perikanan masih kekurangan tenaga staf untuk melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan masyarakat yang harus dilaksanakan oleh Dinas Perikanan.

Jumlah pegawai Dinas Perikanan berdasarkan tingkat Golongan



**Tabel.1.3.**

**Jumlah PNS Dinas Perikanan  
Kab.Malinau Berdasarkan Golongan  
Tahun 2020**

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan I	1
2.	Golongan II	9
3.	Golongan III	15
4.	Golongan IV	3
Jumlah		28

*Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2020*

Dilihat dari tabel 2. Jumlah PNS berdasarkan golongan tersebut diatas, golongan I sebanyak 1 orang, golongan II sebanyak 9 orang, golongan III sebanyak 15 orang, golongan IV sebanyak 3 orang. Disamping jumlah PNS yang memiliki tingkat pendidikan juga telah mengikuti diklat kepemimpinan.

Jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut :

**Tabel. 1.4.**

**Jumlah PNS Dinas Perikanan  
Kab.Malinau Yang Telah Mengikuti Diklat  
Tahun 2020**

No	Pendidikan	Jumlah
1.	Diklat PIM II	1
2.	Diklat PIM III	2
3.	Diklat PIM IV	5
4.	Pejabat yang belum mengikuti Diklat Kepemimpinan sesuai Jabatannya	5

*Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2020*



Dilihat dari tabel 3 jumlah PNS yang telah mengikuti Diklat PIM II sebanyak 1 orang, PIM III sebanyak 2 orang, dan PIM IV sebanyak 5 orang dan sebanyak 5 orang Pejabat Eselon IV belum mengikuti Diklat Kepemimpinan IV. Untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat maka Diklat Kepemimpinan wajib diikuti.

Jumlah pegawai Dinas Perikanan yang memiliki jabatan eselon dapat dilihat pada tabel.4

**Tabel.1.5.**  
**Jumlah PNS Dinas Perikanan**  
**Kab.Malinau Berdasarkan Eselon**  
**Tahun 2020**

No	Tingkat Eselon	Jumlah
1.	Eselon II b	1
2.	Eselon III a	1
3.	Eselon III b	2
4.	Eselon IVa	9
5.	Eselon IVb	-
	Jumlah	13

Sumber : Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan Tahun 2020

## F. Permasalahan Utama

Paradigma Pembangunan Kabupaten Malinau 2016 - 2021 melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA) merupakan model pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau yang sebagian masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan dan pembudidaya ikan. Untuk peran Dinas Perikanan Kabupaten Malinau sangat penting dalam menyukseskan pembangunan Kabupaten Malinau dengan visi : "**Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera melalui Gerakan Desa Membangun (GERDEMA)**".



Kabupaten Malinau dengan bentang alam yang sangat luas merupakan peluang sekaligus tantangan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Malinau untuk mengembangkan dan meningkatkan target pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan dan berdaya saing. Peluang tersebut jika didukung oleh kebijakan pemerintah yang berpihak pada nelayan dan pembudidaya ikan; tersedianya sumber daya perikanan yang andal dan profesional; tersedianya prasarana dan sarana perikanan yang mencukupi; lingkungan kerja yang sehat; minat dan kemauan yang besar dari masyarakat dalam pengembangan usaha di bidang perikanan.

Dinas Perikanan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016, mengemban tugas sesuai asas otonomi daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya tentu ada kendala/ tantangan yang dihadapi, terlebih keberadaan Dinas Perikanan merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang baru terbentuk tentu memerlukan pembenahan Internal organisasi, untuk mengetahui hal tersebut, perlu diadakan analisis terhadap keberadaan SKPD itu sendiri.

Analisis internal Dinas Perikanan Kabupaten Malinau memiliki kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Kekuatan yang dimiliki SKPD yaitu :

- a. Memiliki sumber daya lahan perikanan yang cukup potensial
- b. Memiliki struktur organisasi yang jelas
- c. Dukungan dana
- d. Tersedianya data dasar perikanan
- e. Tersedianya sarana dan prasarana

Dibalik kekuatan yang dimiliki, disisi yang lain juga mempunyai kelemahan antara lain :

- a. Alih fungsi lahan yang cenderung meningkat
- b. Belum lengkapnya standar operasional prosedur
- c. Lemahnya manajemen pengelolaan data
- d. Masih lemahnya koordinasi
- e. Kualitas SDM masih perlu ditingkatkan

Melihat kekuatan dan kelemahan yang dimiliki SKPD, tantangan/hambatan dapat diatasi dengan memaksimalkan kekuatan yang dimiliki dan mereduksi kelemahan, untuk meraih peluang dalam rangka pengembangan pelayanan SKPD.



Peluang yang dapat diraih antara lain :

1. Mengoptimalkan peningkatan kemampuan sumber daya manusia baik Aparatur Sipil Negara maupun Nelayan Kecil melalui diklat, bimbingan teknis, kursus dan sejenisnya
2. Mengoptimalkan fungsi Balai Benih Ikan (BBI), Kawasan Minapolitan serta potensi lahan Perikanan yang ada dengan di dukung rekayasa teknologi pakan buatan/ pakan mandiri yang bermutu
3. Merekrut generasi muda untuk mau menekuni perikanan dengan memberikan insentif dan kemudahan-kemudahan dalam menekuni usaha Perikanan
4. Meningkatkan sarana/prasarana untuk memperlancar transportasi hasil - hasil Perikanan
5. Meningkatkan kuantitas benih ikan dan mutu benih ikan dan pengolahan hasil - hasil perikanan yang lebih variatif dan higienis
6. Mempermudah akses ke sumber-sumber pembiayaan dan akses pemasaran serta jaminan harga.

Dengan dukungan stakeholder dan political will dari pemerintah, maka tantangan akan dapat diatasi dan peluang pengembangan pelayanan SKPD ke depan dapat diupayakan secara optimal. Adapun yang menjadi kendala saat ini adalah akses pemasaran, biaya produksi yang tinggi, masih rendahnya sumber daya manusia pengolahan hasil Perikanan. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi daerah, salah satunya mungkin dapat ditempuh dengan menekan biaya produksi serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan pembudidaya serta mengencangkan promosi.

## G. Sistematika Penyajian

Pelaporan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja tahun 2020. rencana Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perikanan berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :



Bab. I Pendahuluan : pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja : pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja :

A. Capaian Kinerja Organisasi :

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;
2. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
3. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malinau, Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2016 – 2021 merupakan perencanaan jangka menengah Dinas Perikanan yang berisikan tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun beserta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang dilaksanakan.

Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Perikanan telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Malinau khususnya dengan prioritas pembangunan di bidang Perikanan. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kabupaten Malinau "***Mewujudkan Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun***", maka tujuan dari Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dituangkan dalam pernyataan meningkatnya hasil perikanan untuk meningkatkan produksi ikan di Kabupaten Malinau.

Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan fungsi ***Pelaksana*** dari misi ke Lima (5) dari Bupati dan Wakil Bupati terpilih, yakni ***Meningkatkan Peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa : One Village One Product dengan semboyan " Bertani Sehat"***

#### 1. Tujuan dan Sasaran

Dalam pelaksanaan Kegiatan Dinas Perikanan perlu ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan, sedangkan sasaran yang merupakan penjabaran dari tujuan adalah Kondisi yang ingin dicapai setiap Tahunnya dalam kurun waktu 5 (Lima ) Tahun

Tujuan dan sasaran Dinas Perikanan yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan selama kurun lima tahun sesuai dengan misi yang telah ditetapkan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini



Tabel. 2.1

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun Ke –					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya Produksi Perikanan	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	171,17	180,24	189,21	198,63	208,51	218,89
			Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	136,74	143,94	151,52	159,10	167	175,36

Sumber : Data Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya

**2. Indikator Kinerja**

Sebagaimana telah disinggung di depan, bahwa setiap SKPD wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dinas Perikanan telah menetapkan 2 (Dua) Indikator Kinerja yaitu :

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

Untuk mencapai 1 (satu) sasaran yaitu : "Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan"

Dengan melalui 1 (satu) strategi yaitu : "Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam, sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan".

Untuk melaksanakan strategi dan mencapai tujuan serta sasaran di tempuh melalui 1 (satu) arah kebijakan yaitu : Pengembangan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan

Adapun Indikator Kinerja Dinas Perikanan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :



**Tabel .2.2**  
**Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD Tahun 2016	Target Capaian setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	
1	Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	171,17	180,24	189,21	198,63	208,51	218,89	218,89
2	Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	136,74	143,94	151,52	159,10	167	175,36	175,36

Sumber : Data Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya

Untuk mendukung tercapainya sasaran yang telah ditetapkan melalui indikator kinerja utama yang dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tentu sangat memerlukan dukungan dari sasaran – sasaran pendukung lainnya seperti : meningkatnya penerapan teknologi perikanan; meningkatnya produksi perikanan meningkatnya penanganan pasca panen, pengolahan hasil dan pemasaran produk serta meningkatnya jumlah dan pemeliharaan/ perbaikan infrastruktur perikanan. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama SKPD yang telah ditetapkan lewat IKU di atas, tentu saja tidak boleh lepas dari sasaran dan tujuan dari **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2016 – 2021** yang telah ditetapkan lewat Peraturan Daerah, karena pada dasarnya penyusunan Rencana Strategis SKPD wajib mengacu kepada RPJMD.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III di depan, bahwa Dinas Perikanan Kabupaten Malinau melaksanakan Misi ke 5 Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang tertuang dalam RPJMD 2016 – 2021, ***Meningkatkan Peran Pertanian (Tanaman pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam perekonomian daerah melalui pengembangan produk unggulan desa : One Village one product dengan semboyan “ Bertani Sehat”*** Salah satu ***tujuan*** yang berkaitan dengan indikator kinerja utama SKPD adalah ***Meningkatnya Nilai tambah dan pendapatan petani, pekebun, peternak dan pembudidaya ikan***



Indikator Kinerja Utama yang mengacu kepada sasaran **Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan** Renstra (Rencana Strategis) SKPD, juga telah mengacu *kepada sasaran RPJMD 2016 – 2021 yang berbunyi Mengembangkan Produk Unggulan*

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa secara hierarki, Indikator Kinerja Utama SKPD, sepenuhnya telah mengacu kepada Sasaran yang telah ditetapkan oleh SKPD maupun telah mengakomodir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah periode 2016 – 2021.

### 3. Strategi dan Arah Kebijakan

Sesuai dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Perikanan maka Strategi dan Arah Kebijakan Perikanan selama lima tahun dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

**Tabel .2.3**  
**Tujuan Sasaran, Stategi dan Kebijakan**

Visi	:	Mewujudkan Kabupaten Malinau yang maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun		
Misi 5	:	Meningkatkan Peran Pertanian (Tanaman Pangan, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan) dalam Perekonomian Daerah melalui Pengembangan Produk Unggulan Desa : One Village One Product dengan Semboyan " Bertani Sehat"		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya produksi perikanan	1. Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam, sarana dan prasarana secara berkelanjutan untuk peningkatan hasil perikanan	Pengembangan, perbaikan dan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan serta peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan	

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Malinau 2016 - 2021, maka Dinas Perikanan perlu menyusun strategi dan arah kebijakan yang terencana, terpadu, dan terukur dengan memperhitungkan lingkungan strategis, dukungan kelembagaan dan ketersediaan sumber pembiayaan.

Kebijakan yang perlu ditempuh agar tercapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

#### a. Kebijakan Bidang Perikanan

- 1) Perbaikan dan peningkatan infrastruktur
- 2) Pengembangan pusat pembenihan
- 3) Penyediaan peralatan dan sarana produksi
- 4) Penyediaan jaminan kredit bagi pembudidaya ikan



- 5) Peningkatan keterampilan pembudidaya ikan
- 6) Pengembangan kelompok perikanan
- 7) Peningkatan penyuluh perikanan

#### 4. Program

Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang telah disusun. Dengan demikian, apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan strategi terkait juga telah dapat dicapai.

Kemudian pada masing-masing sasaran ditetapkan program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran terkait. Sama seperti sasaran terhadap tujuan, program-program yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian sasaran yang terkait.

Ikhtisar masing-masing sasaran dan program dapat dilihat pada tabel dibawah ini sebagai berikut:

Tabel 2.4. Sasaran dan Program Kegiatan Perikanan Tahun 2020.

SASARAN		PROGRAM	KEGIATAN	Target	Pagu Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan Perkantoran	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan Alat Tulis Kantor	45 Jenis	21.192.787,82
			Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	45 Kali	119.383.838,04
2	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Restocking Ikan	39.843 ekor	35.708.700
			Pengadaan Alat Tangkap Ikan	2 Jenis	170.981.900
3	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Program Pengembangan Budi Daya Perikanan	Operasional UPTD BBI	4 Jenis	85.053.345
			Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan	100 Orang	35.505.913



SASARAN		PROGRAM	KEGIATAN	Target	Pagu Anggaran
4	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Program Pembangunan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan ( UPTD Kabupaten/ Kota	Rehabilitasi Kolam Atau Bak Induk/Calon Induk yang dapat Difungsikan	602 m <sup>2</sup>	72.898.671
			Rehabilitas Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (keluar)	15 meter	25.076.669
			Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul	2 Jenis	36.636.000
			Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	12 Bulan	20.984.000
5	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Program Pengadaan Saran dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	171 Unit	513.000.000
			Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	14 Unit	42.000.000
6	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tunjangan Kerja PPL Perikanan ( Bankeu Prov)	12 Bulan	12.000.000
<b>TOTAL ANGGARAN DAN REALISASI FISIK KEGIATAN TAHUN 2020</b>					<b>1.190.421.823,86</b>

Dari table diatas Dinas Perikanan pada tahun 2020 akan melaksanakan rencana kinerja dengan 6 (enam) Program dengan 13 (tiga belas) Kegiatan.



## B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan ditetapkan dengan 2 (dua) indikator kinerja yaitu produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap dengan menetapkan target yang akan dicapai. Target yang ditetapkan merupakan target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan 2016-2021. Rencana Kinerja Tahunan yang ditetapkan Dinas Perikanan Kabupaten Malinau dapat dilihat pada table 2.4.

Tabel 2.4. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	Ton	167
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	Ton	208,51

Sumber : Data Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya

Untuk mendukung rencana kinerja tahunan yang akan dilaksanakan disusunlah rumusan rencana program dan kegiatan yang dapat dilihat pada table 2.5.



Tabel 2.5.

## Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2020

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program /Kegiatan	Rencana Tahun 2020 (Tahun rencana)			
			Lokasi	Target capaian kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (000)	Sumber Dana
1	2	3				
3.01	Urusan Pilihan					
3.01.3.01.01.01	Bidang Urusan Pemerintahan					
3.01.3.01.01.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran					
3.01.3.01.01.01.01.10	Pengadaan ATK	Jumlah kebutuhan ATK	SKPD	45 Jenis	30.000	APBD II
3.01.3.01.01.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi	Jumlah rapat - rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	SKPD	45 Kali	170.000	APBD II
3.01.3.01.01.01	Program Pengembangan Perikanan Tangkap					
3.01.3.01.01.01	Restocking Ikan	Jumlah benih ikan yang ditebarkan diperairan umum	Kab. Malinau	40,000	50.000	APBD II
3.01.3.01.01.01	Pengadaan Alat Tangkap Ikan	Jumlah alat tangkap	Kec. Malinau Utara dan Kota	2 Jenis	256.820	APBD II
3.01.3.01.01.01.20.	Program Pengembangan Budidaya Perikanan					
3.01.3.01.01.01.20.04	Operasional UPTD Balai Benih Ikan (BBI)	Jumlah Kebutuhan BBM, Obat-obatan dan Pakan Ikan	BBI Kalamok	15 Jenis	100.000	APBD II
3.01.3.01.01.01	Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan	Jumlah pelaku usaha perikanan yang disuluh dan terlatih	3 Kecamatan	150 Orang	50.000	APBD II
3.01.3.01.01.01	Program Pem bangunan/Rehabilitasi Saranan dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan (UPTD Kabupaten/Kota)					
3.01.3.01.01.01	Rehabilitasi Kolam atau Bak Induk/calon induk (m) <sup>2</sup>	Jumlah panjang kolam atau bak induk/calon induk yang dapat difungsikan	BBI Kalamok	602 meter <sup>2</sup>	148.680	APBD II
3.01.3.01.01.01	Rehabilitas Saluran Air Pasok (Masuk) dan Keluar	Jumlah panjang saluran air pasok ( masuk ) keluar	BBI Kalamok	15 meter	50.000	APBD II
3.01.3.01.01.01	Penyediaan Calon Induk Unggul beserta Pakan Calon Induk Unggul	Jumlah calon induk ikan	BBI Kalamok	2 Jenis	51.320	APBD II
3.01.3.01.01.01	Penunjang DAK Bidang Perikanan	Jumlah Penunjang Kegiatan DAK Kelautan dan Perikanan	Kab. Malinau	12 Bulan	20.984	APBN/DAK
3.01.3.01.01.01	Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan					
3.01.3.01.01.01	Alat Penangkapan ikan Ramah Lingkungan	Jumlah alat penangkapan ikan ramah lingkungan	Malinau	283 Meter	513.000	APBN/DAK
3.01.3.01.01.01	Alat Bantu Penangkapan ikan	Jumlah alat bantu penangkapan ikan	Kec. Malinau Utara	1 Dokumen	42.000	APBN/DAK
3.01.3.01.01.01	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur					
3.01.3.01.01.01	Tunjangan PPL Perikanan (Bankeu Prov)	Jumlah PPL Perikanan yang mendapatkan tunjangan kerja	Malinau	12 Bulan	12.000	Bankeu/ APBD I



### C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Tahunan pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

Penetapan Perjanjian Kinerja tahunan merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan PermenPan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perikanan tahun 2020 adalah sebagai berikut :

#### **PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sofyan, S.Pd, M.Si  
Jabatan : Kepala Dinas Perikanan

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr.Yansen.TP.M.Si  
Jabatan : Bupati Malinau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Tabel 2.6.  
Perjanjian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	167,00
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	208,51

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp	200.000.000,00	APBD
2.	Pengembangan Budidaya Perikanan	Rp	150.000.000,00	APBD
3.	Pengembangan Perikanan Tangkap	Rp	306.820.000,00	APBD
4	Pembangunan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten/Kota)	Rp	270.984.000,00	APBD/DAK
5	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)	Rp	555.000.000,00	DAK
	Jumlah		<b>Rp 1.482.804.000,00</b>	



### BAB III

## AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk memepertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrument pertanggungjawaban secara periodic yaitu laporan kinerja. Instrumen pertanggung jawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja serta akuntabilitas keuanagn yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam memepertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat pencapaian. Dapat dilakukan dengan menggunakan formula pengukuran kinerja kegiatan dan Formula pengukuran sasaran. Capaian kinerja Dinas Perikanan diukur dengan menggunakan rumus formulasi sebagai berikut :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk membuat kesimpulan hasil dari evaluasi kinerja dibuat skala pengukuran kinerja dengan skala pengukuran ordinal :

85 s/d > 100 %	= Sangat baik/sangat berhasil
70 < 85 %	= Baik/berhasil
55 < 70 %	= Sedang/cukup berhasil
< 55 %	= Kurang berhasil



## A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja. Untuk dapat menilai keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan perlu dilakukan pengukuran kinerja. Adapun Capaian Kinerja Dinas Perikanan pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tabel 3.1.

Capaian Kinerja Dinas Perikanan Tahun 2020

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian %
1	Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi Budidaya Perikanan (Ton)	167,00	41,52	24,86
		Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	208,51	95,62	45,86
Rata rata Capaian					36,52

Nilai capaian sasaran strategis merupakan rata rata capaian dari seluruh indikator yang ditetapkan oleh dinas Perikanan. Capaian kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan adalah sebesar 36,52 % dari 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu terdiri dari Produksi Budidaya Perikanan dengan realisasi sebesar 41,52 Ton atau 24,86 % dan Produksi Perikanan Tangkap dengan realisasi sebesar 95,62 Ton atau 45, 86 %. Adapun masing masing Capaian indikator kinerja sasaran strategis akan dijelaskan sebagai berikut :

### 1. Produksi Budidaya Perikanan

Target indikator produksi budidaya perikanan pada tahun 2020 sebesar 167,00 Ton dan realisasi 41,52 Ton sehingga capaian kinerja indikator ini sebesar 24,86 %. Berikut ini disajikan tabel data statistic produksi perikanan budidaya :



Tabel 3.2.  
Produksi Budidaya Perikanan Tahun 2020

Sub Sektor Budidaya Air Tawar/Kolam

Satuan :  
Ton

No	Kecamatan	Jumlah	Ikan						
			Ikan Mas	Gurame	Lele	Nila	Patin	Bawal A. T.	Ikan Lain
	<b>Jumlah</b>	<b>41,52</b>	<b>0,20</b>	<b>0,00</b>	<b>8,65</b>	<b>6,78</b>	<b>25,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.	Malinau Kota	20,37	-	-	4,31	3,36	12,70	-	-
2.	Malinau Utara	18,70	-	-	3,60	2,81	12,29	-	-
3.	Malinau Barat	2,45	0,20	-	0,74	0,61	0,90	-	-
4.	Malinau Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Mentarang	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Pujungan	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Kayan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Kayan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Sungai Boh	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Mentarang Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Kayan Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-
12.	Bahau Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Malinau Selatan Hilir	-	-	-	-	-	-	-	-
14.	Malinau Selatan Hulu	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	Sungai Tubu	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber : Buku Tahunan Statistik Perikanan Tahun 2020

## 2. Produksi Perikanan Tangkap

Target indicator produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 sebesar 208,51 Ton dan realisasi 95,62 Ton sehingga capaian kinerja indicator ini sebesar 45,86 %. Berikut ini disajikan tabel data statistic produksi perikanan tangkap :



Tabel 3.3.

## Produksi Perikanan Tangkap Tahun 2020

Sub Sektor Perikanan Perairan Umum

Satuan : Ton

No	Kecamatan	Jumlah	Ikan									
			Salap (Nilem)	Purut (Hampal)	Baung	Patin	Kakap Cina	Gurami	Pelian	Lais	Udang Galah	Nilu
	<b>Jumlah</b>	<b>95,62</b>	<b>17,60</b>	<b>10,76</b>	<b>13,85</b>	<b>11,03</b>	<b>5,52</b>	<b>4,83</b>	<b>11,03</b>	<b>5,44</b>	<b>8,97</b>	<b>6,59</b>
1.	Malinau Kota	13,50	2,90		1,88	1,27				0,96	4,98	1,51
2.	Malinau Utara	12,03	3,09		2,01	1,15				1,50	2,91	1,37
3.	Malinau Barat	7,13	1,70	1,12	0,94	0,66		0,33		0,87	0,84	0,67
4.	Malinau Selatan	8,40	1,66	1,04	1,81	0,90	0,61	0,49	0,69	0,35	0,12	0,73
5.	Mentarang	11,04	2,75	2,34	1,16	1,17	0,68	0,36	1,14	0,56	0,12	0,76
6.	Pujungan	4,32	0,91	0,48	0,24	0,48	0,36	0,71	0,90	0,12		0,12
7.	Kayan Hulu	4,67	0,72	0,93	0,60	0,48	0,63	0,12	0,95	0,12		0,12
8.	Kayan Hilir	4,82	0,72	0,84	0,84	0,48	0,62	0,12	0,96	0,12		0,12
9.	Sungai Boh Mentarang	5,51	0,72	0,48	0,84	0,84	0,24	0,59	1,56	0,12		0,12
10.	Hulu	6,84	0,48	1,73	0,90	0,72	0,70	0,48	1,59	0,12		0,12
11.	Bahau Hulu	2,40	0,24	0,24	0,24	0,48	0,12	0,12	0,72	0,12		0,12
12.	Kayan Selatan Malinau	2,03	0,24	0,24	0,24	0,48	0,12	0,12	0,24	0,12		0,23
13.	Selatan Hilir Malinau	3,24	0,48	0,24	0,60	0,72	0,12	0,12	0,72	0,12		0,12
14.	Selatan Hulu	4,33	0,36	0,24	0,72	0,60	0,72	0,61	0,72	0,12		0,24
15.	Sungai Tubu	5,36	0,63	0,84	0,83	0,60	0,60	0,66	0,84	0,12		0,24

Sumber : Buku Tahunan Statistik Perikanan Tahun 2020

**B. Analisis Capaian Kinerja**

Capaian sasaran Dinas Perikanan Tahun 2020 berdasarkan perhitungan persentasi pencapaian kinerja sasaran dinas Perikanan adalah sebesar **36,52 %** dengan rincian pada table 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.4.

Evaluasi Pencapaian Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan

No	Indikator Kinerja Sasaran	Target (Ton)	Realisasi (Ton)	Capaian (%)
1.	Produksi Perikanan Budidaya	167	41,52	24,86
2.	Produksi Perikanan Tangkap	208,51	95,62	45,86
<b>Rata-rata Capaian</b>				<b>36,52</b>



Dari capaian indicator sasaran tersebut dapat ditunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Malinau masih dikategorikan **Kurang berhasil**. Selama periode tahun 2020 Dinas Perikanan telah melaksanakan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

### 1. Produksi Perikanan Budidaya

Berdasarkan indicator kinerja sasaran " *Produksi Perikanan Budidaya*" terhadap peningkatan produksi perikanan budidaya pada tahun 2020 dengan target yang telah ditetapkan di RENSTRA tahun 2016-2021 yaitu sebesar 167 ton dan terealisasi produksi perikanan budidaya 41,52 atau masih kurang sebanyak 125,48 Ton dari target yang telah ditetapkan, ini terlihat bahwa target produksi tidak terpenuhi dengan capaian hanya 24,86 % dengan hasil evaluasi kinerja masih bisa dikategorikan **Kurang Berhasil**.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung produksi perikanan budidaya yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi Produksi Perikanan Budidaya}}{\text{Target Produksi Perikanan Budidaya}} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2017,2018,2019 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.5

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Produksi Perikanan Budidaya Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir



IKU/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 Vs Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	41,52	144,3	93,34	126,56	347,54	64,68	135,59

Sebagai salah satu sumber protein hewani yang utama bagi masyarakat, ikan menjadi salah satu komponen penting dalam mewujudkan system ketahanan pangan. Terjadinya peningkatan jumlah penduduk dan kesadaran terhadap gizi dan kesehatan menyebabkan tingkat konsumsi ikan per kapita menjadi meningkat. Dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang mandiri terutama dalam pemenuhan kebutuhan protein hewani maka pemerintah harus dapat menjaga ketersediaan ikan secara berkelanjutan.

Berdasarkan tabel 3.5 diatas tampak bahwa realisasi kinerja terhadap indicator produksi perikanan budidaya bervariasi setiap tahunnya, yakni dari tahun 2017 sebesar 347,54%, tahun 2018 sebesar 64,68 % dan pada tahun 2019 sebesar 135,59 % hal ini dikarenakan adanya factor situasi dan kondisi lapangan yang mempengaruhi produksi perikanan budidaya.

Pada tahun 2017 2018 capaian kinerja menurun sebesar 282,86 % yakni kondisi produksi perikanan budidaya menurun 50,96 ton hal ini terjadi dikarenakan harga ikan air tawar lebih tinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, pemasaran yang tidak pasti, harga pakan yang tinggi serta beberapa factor yang mempengaruhi produksi perikanan budidaya. Sedangkan dari tahun 2018 2019 capaian kinerja meningkat sebesar 70,91% yakni kondisi produksi perikanan budidaya naik sebesar 33,22 ton. Adapun capaian kinerja pada tahun 2019 2020 terjadi penurunan produksi budidaya sekitar 85,04 hal ini dikarenakan refocusing kegiatan dan pandemi covid 19 yang sangat berpengaruh terhadap aktifitas pembudidaya dan peningkatan sarpras pembudidaya.

Berdasarkan realisasi kinerja tahun sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.6

## Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Produksi Perikanan Budidaya Dengan Target Jangka Menengah

<b>IKU/Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Target Akhir RPJMD Tahun 2021</b>	<b>Persentase Capaian Terhadap Target 2021</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>7</i>
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	41,52	175,36	23,68

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir renstra tahun 2021 adalah perbandingan realisasi produksi perikanan budidaya tahun 2020 sebesar 41,52 ton dengan target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 175,36 ton maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 23,68 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan

Dari tabel tabel perbandingan diatas yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemamparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Dari tabel diatas capaian indicator peningkatan Perikanan Budidaya untuk tahun 2020 produksi Perikanan Budidaya mencapai sebanyak 41,52 ton atau capaian kinerja sebesar 24,86 % dari target yang telah ditetapkan didalam Perubahan RENSTRA 2016-2021 masih belum tercapai dan permasalahan yang dihadapi tidak tercapainya target produksi budidaya ikan pada tahun 2020 disebabkan beberapa factor, yaitu :

1. Sarana dan Prasarana perikanan budidaya yang belum memadai
2. Target pemasaran yang tidak jelas
3. Biaya operasional yang tinggi pada usaha budidaya ikan yang mengakibatkan penurunan keuntungan



4. Harga barang produk perikanan dari luar daerah lebih murah
5. Kawasan sentra perikanan banyak yang beralih fungsi
6. Petugas penyuluh hanya ada 1 (satu) dari pusat
7. Balai Benih Ikan (BBI) belum optimal
8. Masih tingginya harapan pembudidaya ikan terhadap bantuan baik berupa stimulant maupun benih ikan dan pakan kepada pemerintah daerah
9. Masih kurangnya ketersediaan benih ikan air tawar dan induk ikan unggul yang menjadi faktor kunci keberhasilan usaha budidaya perikanan
10. Kelompok pembudidaya perikanan yang dibentuk masyarakat banyak yang belum/tidak memiliki legalitas kelompok
11. Adanya Pandemi Covid 19
12. Refocusing anggaran belanja

Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan tidak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan sarana dan prasarana perikanan budidaya
2. Mengupayakan program kegiatan pakan mandiri
3. Mengupayakan bantuan benih ikan dan pakan ikan
4. Mengoptimalkan fungsi dan peran BBI Kaliamok
5. Peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompok pembudidaya
6. Optimalisasi kegiatan pembinaan-pembinaan melalui penyuluhan-penyuluhan terhadap perikanan tangkap.
7. Mengupayakan penyuluh perikanan
8. Peningkatan kapasitas pembudidaya
9. Peningkatan kapasitas aparatur (SDM)
10. Pencegahan pandemi Covid 19

b. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja



Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel 3.7.**

**Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (TON)</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>REALISASI KEUANGAN (%)</b>
Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	41,52	<b>Program Pengembangan Budi Daya Perikanan</b> 1. Operasional UPTD BBI 2. Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan  <b>Program Pembangunan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan ( UPTD Kabupaten/ Kota</b> 1. Rehabilitasi Kolam Atau Bak Induk/Calon Induk yang dapat Difungsikan 2. Rehabilitas Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (keluar) 3. Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul 4. Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan  <b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b> 1. Tunjangan Kerja PPL Perikanan ( Bankcu Prov)	49,76
			100	
			100	



Dari tabel diatas indicator kinerja didukung dengan beberapa program dan kegiatan untuk usaha pencapaiannya. Pada tahun 2020 dengan pencapaian indicator kinerja Produksi Perikanan Budidaya sebesar 41,52 ton atau sebesar 24,86 %. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indicator kinerja tersebut diatas adalah Program Pengembangan Budi Daya Perikanan dengan sumber pendanaan dari APBD, untuk kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan tidak dilaksanakan dikarenakan adanya pandemic covid 19. Program Pembangunan /Rehabilitas Sarana dan Prasarana Pokok Unit Perbenihan ( UPTD Kabupaten/ Kota) dengan sumber pendanaan APBD serta melalui Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan sumber pendanaan dari Bankeu Provinsi.

Dari tabel 3.7. dapat dilihat rincian masing masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

### **1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan**

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik kegiatan 100% dengan kegiatan penunjang sebagai berikut :

#### **a. Kegiatan Operasional Balai Benih Ikan**

Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 155.550.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 85.053.345,- dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 84.670.000,- atau 99,55 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.8

#### Kegiatan Operasional balai Benih Ikan

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Operasional BBI	APBD II	85.053.345	84.670.000	100	99,55



b. Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan

Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 100.000.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 35.505.913,- dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 0,- atau 0 % dan dengan fisik kegiatan terealisasi 0 %. Dikarenakan adanya pandemi Covid 19 kegiatan penyuluhan tidak dilaksanakan dalam mengurangi penyebaran Covid 19.

Tabel 3.9

Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Penyuluhan dan Pelatihan Perikanan	APBD II	35.505.913	0	0	0

**2. Program Pembangunan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pokok Unit Pembenihan (UPTD Kabupaten)**

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik kegiatan 100% dengan kegiatan penunjang sebagai berikut :

a. Kegiatan Rehabilitas Kolam atau Bak Induk/Calon Induk

Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 416.480.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 72.898.671,- dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 72.898.671,- atau 100 % dan dengan fisik kegiatan terealisasi 100 %.

Tabel 3.10

Kegiatan Rehabilitas Kolam atau Bak Induk/Calon Induk

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Rehabilitas Kolam atau Bak Induk/Calon Induk	APBD II	72.898.671	72.898.671	100	100



b. Kegiatan Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul

Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 71.320.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 36.636.000,- dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 36.636.000,- atau 100 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.11

Kegiatan Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Penyediaan Calon Induk Unggul Beserta Pakan Calon Induk Unggul	APBD II	36.636.000	36.636.000	100	100

c. Kegiatan Rehabilitas Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar)

Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 92.200.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 25.076.669,- dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 25.076.669,- atau 100 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.12

Kegiatan Rehabilitas Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar)

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Rehabilitas Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar)	APBD II	25.076.669	25.076.669	100	100



d. Kegiatan Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 60.000.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 20.984.000,- dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 20.984.000,- atau 100 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.13

Kegiatan Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Penunjang DAK Bidang Kelautan dan Perikanan	DAK	20.984.000	20.984.000	100	100

**3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik kegiatan 100% dengan kegiatan penunjang sebagai berikut :

Kegiatan Tunjangan Kerja PPL Perikanan ( Bankeu Prov)

Target anggaran di Renja sebesar Rp. 12.000.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 12.000.000,- dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 12.000.000,- atau 100 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.14

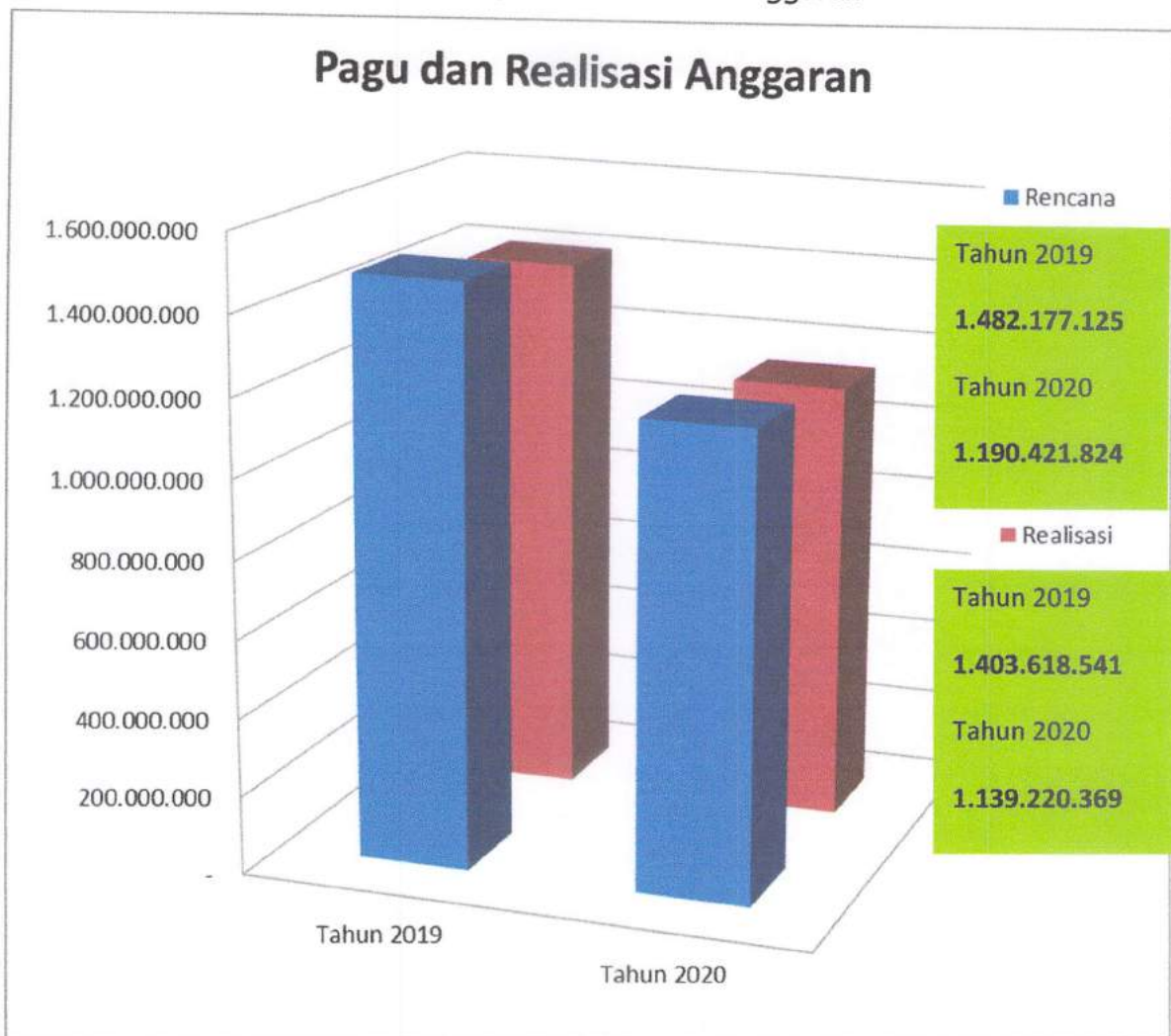
Kegiatan Tunjangan Kerja PPL Perikanan ( Bankeu Prov)

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Tunjangan Kerja PPL Perikanan ( Bankeu Prov)	APBD I (Bankeu Prov)	12.000.000	12.000.000	100	100

### c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

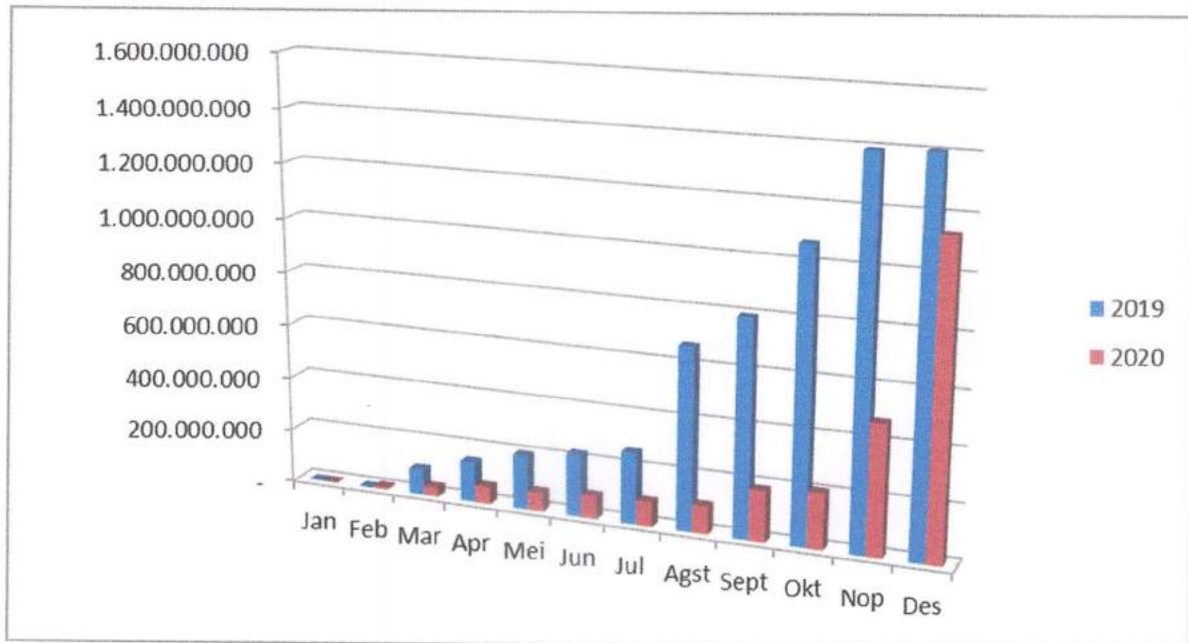
Efisiensi SDM khususnya Bidang Budidaya Perikanan dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jejang pendidikan tinggi S1 dan S2 masih rendah. Meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Gambar 1. Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran



Berdasarkan diagram diatas tampak rencana pagu anggaran pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan rencana pagu anggaran Tahun 2019. Hal ini terjadi karena adanya penghematan anggaran kegiatan yakni dari Rp. 1.482.177.125, menjadi Rp. 1.190.421.824, atau sebesar 19,68 %. Meskipun demikian realisasi penyerapan anggaran pada tahun 2020 yakni 95,70 % lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang hanya 94,70%.

Gambar 2. Perbandingan Penyerapan Anggaran Per Bulan



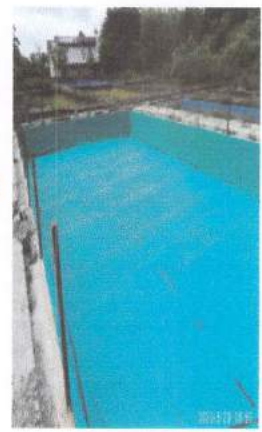
Penyerapan anggaran pada tahun 2020 terdapat hambatan pada semester pertama dimana satuan kerja belum sepenuhnya dapat menyerap anggaran kecuali untuk anggaran operasional sampai dengan rasionalisasi anggaran selesai. Disamping itu beberapa kegiatan DAK kegiatan Perikanan dan Kelautan pencairan dananya dilaksanakan dengan metode penarikan sekaligus yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak kegiatan akan di lakukan pada akhir tahun 2020.

Penyerapan anggaran efektif perbulan yaitu terhitung pada bulan September sampai Desember 2020. Rata rata penyerapan per bulan pada tahun 2020 tersebut lebih rendah dibandingkan rata rata penyerapan tahun 2019.

Berikut dokumentasi atas kegiatan Rehabilitas Kolam atau Bak Induk/Calon Induk dan Kegiatan Rehabiliatsi Saluran Air Pasok (Masuk) dan Buang (Keluar)



**REHAB KOLAM  
CALON  
INDUK/INDUK  
IKAN LOKASI  
BBI MALINAU**



**REHAB SALURAN PASOK (MASUK) DAN BUANG  
(KELUAR)**





## 2. Produksi Perikanan Tangkap

Berdasarkan indikator kinerja sasaran " *Produksi Perikanan Tangkap*" terhadap peningkatan produksi perikanan tangkap pada tahun 2020 dengan target yang telah ditetapkan di RENSTRA tahun 2016-2021 yaitu sebesar 208,51 ton dan terealisasi produksi perikanan tangkap 95,62 ton atau masih kurang sebanyak 112,89 Ton dari target yang telah ditetapkan, ini terlihat bahwa target produksi tidak terpenuhi dengan capaian hanya 45,86 % dengan hasil evaluasi kinerja dikategorikan **Kurang Berhasil**.

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung produksi perikanan tangkap yaitu:

$$\frac{\text{Realisasi Produksi Perikanan Tangkap}}{\text{Target Produksi Perikanan Tangkap}} \times 100\%$$

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2020 dengan tahun 2017,2018,2019 dapat dilihat pada table sebagai berikut :

Tabel 3.15

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Produksi Perikanan Tangkap Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

IKU/Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2020	Realisasi Tahun Lalu			Persentase Kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2020 Vs Tahun		
			2017	2018	2019	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produksi Perikanan Tangkap	Ton	95,62	144,56	101,79	94,43	151,18	106,45	98,76



Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2020 produksi perikanan tangkap sebesar 95,62 ton dengan tahun 2019 sebesar 94,43 ton dari hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan sebesar 98,76% terhadap capaian tahun 2019. Realisasi kinerja mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 menunjukkan penurunan persentase produksi perikanan tangkap hal ini dikarenakan adanya dikarenakan pandemi covid 19 yang sangat berpengaruh terhadap aktifitas nelayan. Disamping itu kurangnya tenaga penyuluh perikanan terkait pemberian informasi data statistic dilapangan yang sampai saat ini hanya ada 1 (satu) penyuluh dari pusat.

Berdasarkan realisasi kinerja tahun sampai dengan tahun 2020 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RPJMD 2016 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.16  
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Produksi Perikanan Budidaya Dengan Target Jangka Menengah

<b>IKU/Indikator Kinerja</b>	<b>Satuan</b>	<b>Realisasi Tahun 2020</b>	<b>Target Akhir RPJMD Tahun 2021</b>	<b>Persentase Capaian Terhadap Target 2021</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>7</i>
Produksi Perikanan Budidaya	Ton	95,62	68,89	138,86

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2020 dengan target akhir renstra tahun 2021 adalah perbandingan realisasi produksi perikanan tangkap tahun 2020 sebesar 95,62 ton dengan target akhir Renstra tahun 2021 sebesar 138,86 ton maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2020 sebesar 138,86 % terhadap target akhir RPJMD tahun 2021.

- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan



Dari tabel tabel perbandingan diatas yang telah disajikan, dapat dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dan pemamparan alternative solusi yang telah diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau.

Dari tabel diatas capaian indicator peningkatan Perikanan Budidaya untuk tahun 2020 produksi Perikanan Budidaya mencapai sebanyak 95,62 ton atau capaian kinerja sebesar 45,86 % dari target yang telah ditetapkan didalam Perubahan RENSTRA 2016-2021 masih belum tercapai dan permasalahan yang dihadapi tidak tercapainya target produksi tangkap pada tahun 2020 disebabkan beberapa factor, yaitu :

1. Berkurangnya populasi ikan diperairan umum/sungai yang diakibatkan oleh pencemaran
2. Profesi sebagai nelayan masih sebagian besar bersifat usaha sampingan (bukan usaha pokok) sehingga produksi dan produktivitas hasil perikanan tangkap fluktuatif
3. Penangkapan ikan masih menggunakan pola tradisional
4. Minimnya alat bantu penangkapan ikan untuk digunakan dalam mempermudah nelayan mencari hasil tangkapan
5. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kelestarian sumber daya perikanan dimana masih ada ditemukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat dan bahan yang dilarang (menggunakan alat setrum dan racun ikan)
6. Terbatasnya kewenangan Dinas Perikanan Kabupaten dalam Pengawasan terhadap perairan umum (Sungai) dikarenakan UU 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah yang berdampak pada pengawasan Perikanan yang dialihkan Ke Kewenangan Provinsi sehingga tidak dapat dianggarkan dalam APBD.
7. Minimnya sarana dan prasarana pengawasan untuk digunakan dalam pengawasan perairan umum
8. Masih rendahnya kualitas dan SDM pengawasan perikanan diperairan umum/sungai.
9. Adanya pandemi Covid 19

Berbagai permasalahan atau kendala diatas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan tidak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain :



1. Memperketat pengawasan amdal dan perusahaan tambang/industri yang membuang air limbah kesungai dengan berkoordinasi dengan dinas terkait
2. Mengkampanyekan kali/sungai bersih
3. Melaksanakan restocking induk ikan dan benih ikan pada Perairan Umum Daratan (PUD)/sungai
4. Mengoptimalkan peran kelompok masyarakat pengawas perikanan dan berkoordinasi dengan DKP provinsi
5. Meningkatkan sarana dan prasarana penangkapan ikan
6. Meningkatkan sarana dan prasarana pengawasan dengan berkoordinasi dengan DKP provinsi
7. Optimalisasi kegiatan pembinaan-pembinaan melalui penyuluhan-penyuluhan terhadap perikanan tangkap.
8. Peningkatan kapasitas aparatur (SDM)
9. Pencegahan pandemi covid 19

b. Analisis program kegiatan yang menunjang keberhasilan atau pun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut :

**Tabel 3.17.**

**Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2020**

<b>SASARAN STRATEGIS</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>CAPAIAN KINERJA (TON)</b>	<b>PROGRAM/ KEGIATAN</b>	<b>REALISASI KEUANGAN (%)</b>
Meningkatnya Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan	Produksi Perikanan Tangkap	95,62	Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1. Pengadaan Alat Tangkap Ikan 2. Restocking Ikan	99,81



			<b>Program Pengadaan Saran dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)</b>  1. Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan 2. Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan	97,8
--	--	--	---	------

Dari tabel diatas indicator kinerja didukung dengan beberapa program dan kegiatan untuk usaha pencapaiannya. Pada tahun 2020 dengan pencapaian indicator kinerja Produksi Perikanan Tangkap sebesar 95,62 ton atau sebesar 45,86 %. Adapun program dan kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan maupun kegagalan capaian indicator kinerja tersebut diatas adalah Program Pengembangan Perikanan Tangkap dengan sumber pendanaan dari APBD serta melalui Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) dengan sumber pendanaan dari DAK.

Dari tabel 3.17. dapat dilihat rincian masing masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

### **1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap**

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik kegiatan 100% dengan kegiatan penunjang sebagai berikut :

#### **a. Kegiatan Pengadaan Alat Tangkap Ikan**

Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 257.000.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 170.981.900,- dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 170.333.900,- atau 99,62 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.



Tabel 3.18  
Kegiatan Pengadaan Alat Tangkap Ikan

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Pengadaan Alat Tangkap Ikan	APBD II	170.981.900	170.333.900	100	99,62

c. Kegiatan Restocking Ikan

Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 35.708.700,- dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 35.708.700,- atau 100 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.19  
Kegiatan Restocking Ikan

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	<u>Restocking Ikan</u>	APBD II	35.708.700	35.708.700	100	100

**2. Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Skala Kecil Masyarakat Kelautan dan Perikanan**

Indikator outcome pada program ini ditargetkan 100 % dan terealisasi fisik kegiatan 100% dengan kegiatan penunjang sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 513.000.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 513.000.000,- dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 499.320.000,- atau 97,33 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.20

## Kegiatan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan	DAK	513.000.000	499.320.000	100	97,33

b. Kegiatan Pengadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan

Target anggaran di Renstra sebesar Rp. 42.000.000,- dan terealisasi pagu DPA Rp. 42.000.000,- dari pagu anggaran tersebut terserap Rp. 41.272.000,- atau 98,27 % dan dengan fisik kegiatan teralisasi 100 %.

Tabel 3.21

## Kegiatan Pengadaan Alat Penangkapan Ikan Ramah Lingkungan

No	Kegiatan	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi		
				Keu(Rp)	Fisik (%)	Keu (%)
1	<u>Pegadaan Alat Bantu Penangkapan Ikan</u>	DAK	42.000.000	41.272.000	100	98,27

## c. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi SDM khususnya Bidang Usaha Perikanan dalam melaksanakan tugasnya tergolong cukup atau sedang yakni dengan melihat tingkat pendidikan yang sudah diselesaikan dimana jejang pendidikan tinggi S1 dan S2 masih rendah. Meskipun demikian efektivitas SDM cukup memuaskan yakni dengan melihat

penurunan pelanggaran yang dilakukan dan insentif yang diterima sehingga pencapaian kinerja kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Penyerapan anggaran pada tahun 2020 terdapat hambatan pada semester pertama dimana satuan kerja belum sepenuhnya dapat menyerap anggaran kecuali untuk anggaran operasional sampai dengan rasionalisasi anggaran selesai. Disamping itu beberapa kegiatan DAK kegiatan Perikanan dan Kelautan pencairan dananya dilaksanakan dengan metode penarikan sekaligus yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak kegiatan akan di lakukan pada akhir tahun 2020.

Berdasarkan hasil analisis untuk kedua indikator tersebut menurut tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di dinas Perikanan menunjukkan pencapaian yang Kurang Berhasil. Dengan demikian terdapat beberapa catatan penting yang perlu diperbaiki diantaranya yaitu :

1. Sistem aplikasi pemantauan capaian kinerja anggaran belum secara optimal dimanfaatkan sebagai alat monev secara berkala atas hambatan dan pencapaian target kinerja di dalam PK dan
2. Hasil evaluasi akuntabilitas belum digunakan sepenuhnya untuk perbaikan pelaksanaan manajemen kinerja dilingkungan Dinas Perikanan Malinau.

Berikut dokumentasi atas kegiatan Restocking Ikan





### C. **si Anggaran**

### **Realisa**

Anggaran Tahun 2020 pada Dinas Perikanan Kabupaten Malinau adalah sebesar **Rp.4.863.432.694,36** sedangkan realisasinya adalah sebesar **Rp.4.689.939.177,00** atau sebesar **96,43 %**. Anggaran Belanja Tidak Langsung atau Belanja Pegawai **Rp. 3.673.010.870,50** dan realisasinya **Rp. 3.550.718.808,00** atau sebesar **96,67 %** Sedangkan Anggaran untuk Belanja Publik atau belanja langsung sebesar **Rp. 1.190.421.823,86** dan realisasinya sebesar **Rp. 1.139.220.369,00** atau sebesar



**95,70 %**, dan realisasi fisik kegiatan sebesar **97,02 %** dapat diuraikan, sebagai berikut :

Tabel. 3.18. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2019

Uraian	Anggaran ( Rp )	Realisasi (Rp)	Prosentase ( % )
<b>1. Belanja</b>	<b>4.863.432.694,36</b>	<b>4.689.939.177,003.</b>	<b>96,43%</b>
<b>2. Belanja Tidak Langsung</b>	<b>3.673.010.870,50</b>	<b>550.718.808,00</b>	<b>96,67%</b>
<b>3. Belanja Langsung</b>	<b>1.190.421.823,86</b>	<b>1.139.220.369,00</b>	<b>95,70 %</b>
<b>A. Belanja Pegawai</b>	79.243.900,00	77.923.900,00	<b>98,33 %</b>
<b>B. Belanja Barang dan Jasa</b>	1.033.450.992,86	983.569.538,00	<b>95,17%</b>
<b>C. Belanja Modal</b>	77.726.931,00	77.726.931,00	<b>100 %</b>



## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Perikanan Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2020. LAKIP ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permentan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Pencapaian sasaran/target kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Malinau tahun 2020 belum sepenuhnya terwujud dengan baik dan memenuhi harapan masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Faktor Internal berkaitan dengan :

- a. Dinas Perikanan merupakan Perangkat Daerah (PD) yang baru terbentuk di awal Januari 2017.
- b. Masih rendahnya pemahaman dan penerapan tugas pokok dan fungsi oleh masing-masing Bidang dalam mencapai sasaran pembangunan sektor perikanan;
- c. Masih minimnya tenaga Penyuluh Perikanan.
- d. Belum optimalnya peran dan fungsi BBI

1. Faktor Eksternal diantaranya adalah :

- a. Masih tingginya harapan para pembudidaya ikan terhadap bantuan baik berupa stimulan maupun benih ikan dan pakan kepada Pemerintah Daerah.
- b. Masih kurangnya minat para usia produktif/ pemuda untuk bergerak di bidang usaha budidaya.
- c. Pola Budidaya Perikanan oleh masyarakat di Kabupaten Malinau masih bergantung dengan warisan budaya/kebiasaan turun temurun menyebabkan produktivitas hasil perikanan masih rendah;



- d. Profesi sebagai pembudidaya ikan dan nelayan masih sebagian besar bersifat usaha sampingan (bukan usaha pokok) sehingga produksi dan produktivitas hasil perikanan fluktuatif sangat bergantung dengan intervensi pemerintah berupa alokasi anggaran terkait;
- e. Sarana dan prasarana nelayan yang masih minim
- f. Berkurangnya populasi ikan diperairan umum yang diakibatkan pencemaran dan penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan (penggunaan racun dan setrum)
- g. Harga barang produk perikanan dari luar lebih murah
- h. Pengawasan perairan umum yang belum optimal

## **B. Langkah Perbaikan**

Untuk mengatasi permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi, Dinas Perikanan Kabupaten Malinau akan mengupayakan langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memaksimalkan fungsi dan peran Dinas Perikanan di tengah keterbatasan anggaran
2. Memberikan pembinaan dan motivasi kepada seluruh pembudidaya perikanan termasuk para pemuda untuk bergerak berusaha pada sektor perikanan.
3. Mengoptimalkan fungsi dan peran BBI Kaliamok
4. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil tangkap perikanan
5. Mengupayakan agar tersedia PPL Perikanan yang saat ini hanya ada 1 (satu) PPL dari pusat
6. Meningkatkan Prasarana dan Sarana Perikanan.
7. Peningkatan dan pembinaan kelembagaan kelompok pembudidaya dan nelayan melalui penilaian kemampuan kelompok pembudidaya dan nelayan secara rutin.
8. Melaksanakan koordinasi Instansi terkait dengan memperketat pengawasan amdal dan perusahaan tambang/industri yang membuang air limbah kesungai
9. Mengkampanyekan kali/sungai bersih
10. Melaksanakan restocking induk dan benih ikan
11. Melaksanakan Koordinasi dengan DKP Provinsi terkait dengan pengawasan, pengolahan dan pemasaran



Dengan tersusunnya LAKIP Dinas Perikanan Kabupaten Malinau Tahun 2020 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan kinerja pemerintah daerah yang lebih transparan, akuntabel dan berkualitas sehingga terwujud masyarakat Kabupaten Malinau yang maju dan sejahtera melalui Geraka Desa Membangun, dengan di topang oleh program dan kegiatan perikanan yang mandiri dan berkelanjutan.